**KOORDINASI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG (NARKOBA) DI KOTA TEGAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan dalam rangka penyelesaian studi strata S1 untuk mencapai gelar**

**SarjanaIlmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**Oleh:**

**DANANG BANGKIT SAPUTRO**

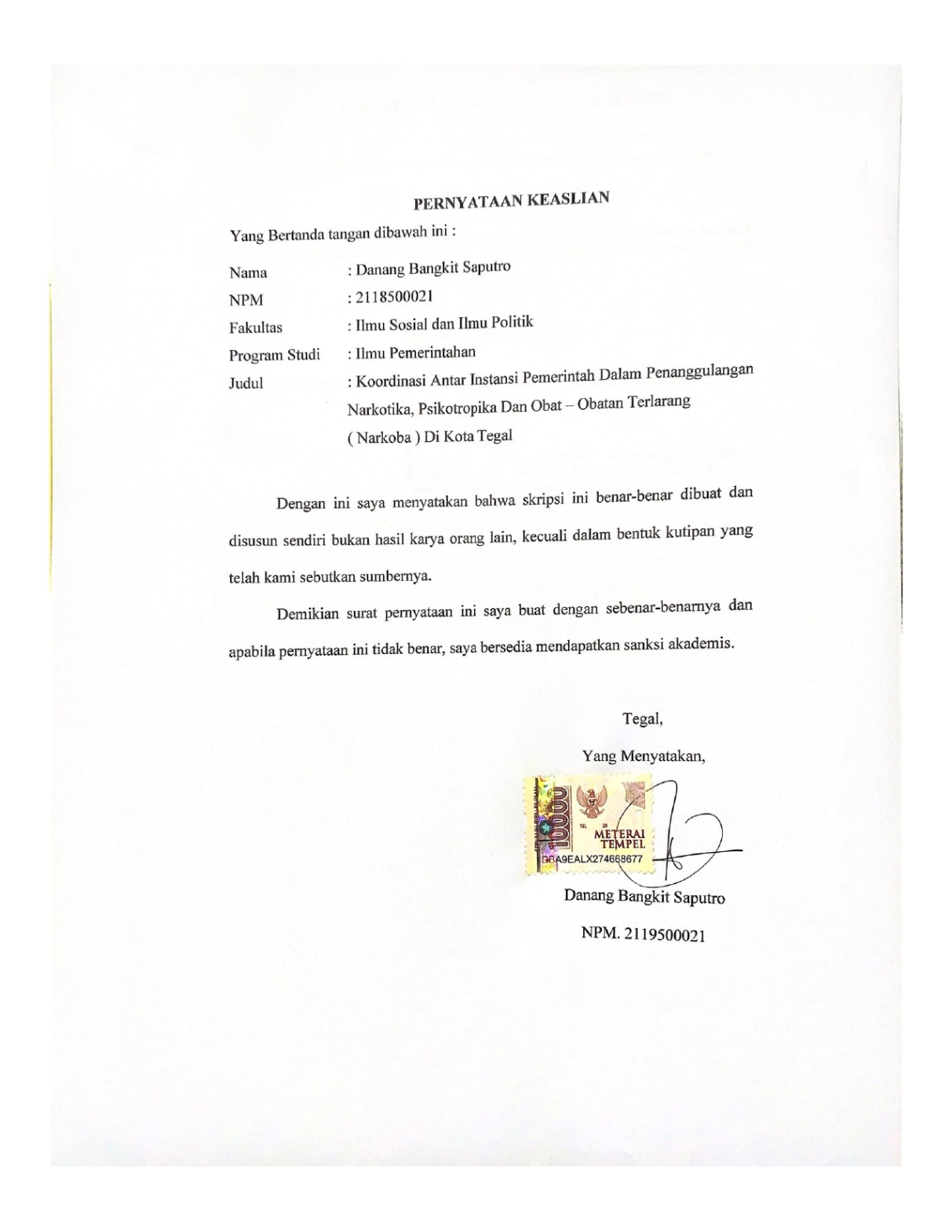
**NPM. 2119500021**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

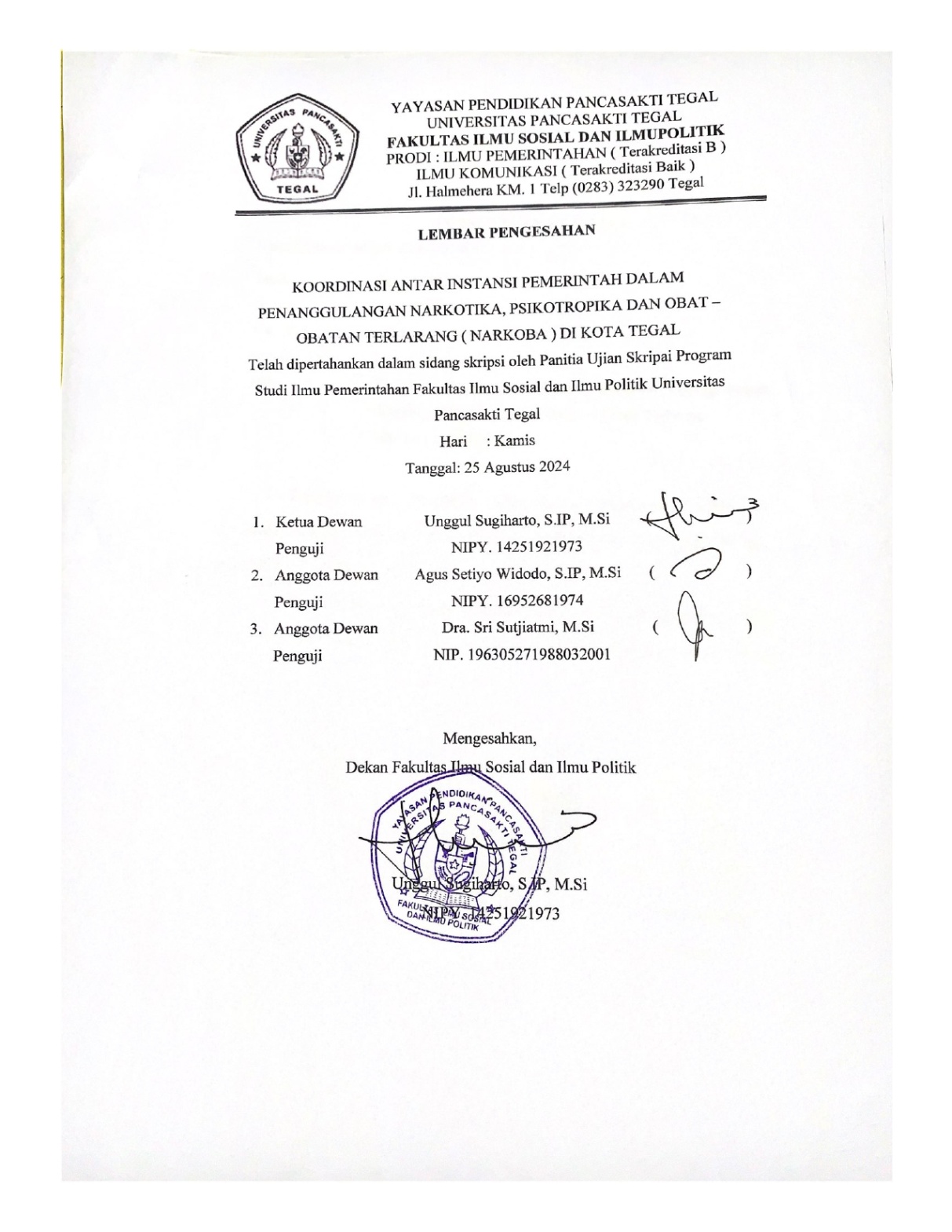


|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

# 





# PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Terimakasih Kepada Mama Srinatun dan Alm Bapak Tapa selaku orangtua atas doa dan perjuangan yang selalu kau berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih Kepada Dewy Sarah Wulandari dan Mey Dwi Astuti selaku kakan atas doa dan perjuangan yang selalu kau berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan ibu dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal yang senantiasa selalu membimbing dan mengarahkan dalam menuntut ilmu.
4. Dan tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Via Retta Sugiyana dan Hanung Dwi Nanda yang selalu support dan membantu dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Aamiinnn

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “KOORDINASI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN OBAT – OBATAN TERLARANG ( NARKOBA ) DI KOTA TEGAL”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi strata Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak/Ibu yang kami hormati :

1. Bapak. Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
2. Ibu Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I, yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan pengarahan serta petunjuk-petunjuk yang sangat diperlukan, hingga selesainya skripsi ini.
3. Bapak Agus Setio W,S.IP.,M.Si sebagai Dosen Pembimbing II, yang dengan rela meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan saran-saran bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Staf Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang pernah diajarkan oleh Bapak Ibu dosen selama ini semoga akan menjadi ilmu yang bermanfaat.
5. Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan pelayanan yang bik dan membantu mahasiswa.

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan menjadikan amal kebajikan dan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Dan penulis menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih ada yang salah atau perlu diperbaiki. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca kepada penulis agar karya ini dapat bermanfaat.

|  |
| --- |
| Tegal, 2024 |
|  |
|  |
| Danang Bangkit Saputro |

# ABSTRAK

Nama : Danang Bangkit Saputro, NPM : 2119500021, Judul Skripsi : “Koordinasi Antar Instansi Pemerintah Dalam Penanggulangan Narkotika, Psikotropika Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) Di Kota Tegal”

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara illegal. Seperti Badan Narkotika Nasional Kota Tegal mempunyai tugas yaitu menyusun, melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan narkotika dan prokersur narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk Koordinasi penanggulangan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Kota Tegal serta mengetahui penerapan dan model koordinasi antar instansi pemerintah dalam penanggulangan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Kota Tegal.Jenis penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan dikumpulkan menjadi satu kesatuan melalui wawancara, dokumentasi, observasi. Hasil dari penelitian ini adalah Koordinasi Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba) di Kota Tegal terdapat peran dan kolaborasi antar instansi yang bertanggungjawab atas hal tersebut dan Penerapan dan Model Koordinasi Antar Instansi Pemerintah dalam Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba) di Kota Tegal terdapat model koordinasi yang diterapkan seperti BNN dan Polres memiliki MOU terkait rehabilitasi pengguna narkoba.

**Kata Kunci : Koordinasi, Penanggunalangan Narkoba, Instansi Pemerintah.**

# ABSTRACT

*Name : Danang Bangkit Saputro, NPM : 2119500021, Thesis Title : "CoordinationBetween Government Agencies in Countering Narcotics, Psychotropics and Illegal Drugs (Drugs) in Tegal City"*

*Drug abuse in Indonesia in recent years has become a serious problem and has reached a worrying state, so that the drug problem has become a national problem. As one of the developing countries, Indonesia is a very potential target as a place for illegal drug trafficking. For example, the National Narcotics Agency of Tegal City has the task of compiling and implementing national policies regarding the prevention and eradication of the abuse and illicit circulation of Narcotics and Narcotic Precursors, preventing and eradicating the abuse and illicit circulation of Narcotic Drugs and Narcotic Precursors, coordinate with the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia in the prevention and eradication of the abuse and illicit circulation of narcotics and narcotics precursors, improve the capacity of medical rehabilitation and social rehabilitation institutions of narcotics addicts, both organized by the government and the community, and empower the community in the prevention and eradication of narcotics abuse and narcotics procedures. This study aims to coordinate the control of narcotics, psychotropics and illegal drugs in Tegal City and to determine the application and coordination model between government agencies in dealing with narcotics, psychotropics and illegal drugs in Tegal City. The type of research that will be used to analyze this study uses a descriptive qualitative method. The data source used in this study is secondary data in the form of documents. Data collection techniques are methods used by researchers to obtain data and collected into a single unit through interviews, documentation, and observation. The result of this study is that the Coordination of Countermeasures against Narcotics, Psychotropics, and Illegal Drugs (Narcotics) in Tegal City there is a role and collaboration between agencies responsible for this and the Implementation and Coordination Model Between Government Agencies in Countering Narcotics, Psychotropics, and Illegal Drugs (Narcotics) in Tegal City there is a coordination model that is applied such as BNN and Polres have an MOU related to the rehabilitation of drug users.*

***Keywords: Coordination, Drug Control, Government Agencies.***

# DAFTAR ISI

[PERSEMBAHAN i](#_Toc174933512)

[KATA PENGANTAR ii](#_Toc174933513)

[ABSTRAK iii](#_Toc174933514)

[ABSTRACT iv](#_Toc174933515)

[DAFTAR ISI v](#_Toc174933516)

[DAFTAR TABEL viii](#_Toc174933517)

[DAFTAR GAMBAR ix](#_Toc174933518)

[BAB I 1](#_Toc174933519)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc174933520)

[I.1. Latar Belakang Penelitian 1](#_Toc174933521)

[I.2. Rumusan Masalah 10](#_Toc174933522)

[I.3. Tujuan Penelitian 10](#_Toc174933523)

[I.4. Manfaat Penelitian 11](#_Toc174933524)

[1. Manfaat Praktis 11](#_Toc174933525)

[2. Manfaat Teoritis 12](#_Toc174933526)

[BAB II 13](#_Toc174933527)

[TINJAUAN PUSTAKA 13](#_Toc174933528)

[II.1. Kerangka Teori 13](#_Toc174933529)

[II.1.1. Penelitian Terdahulu 13](#_Toc174933530)

[II.1.2. Narkoba 18](#_Toc174933531)

[II.1.3. Penyalahgunaan Narkoba 22](#_Toc174933532)

[II.1.4. Koordinasi 27](#_Toc174933533)

[II.2. Definisi Konseptual 40](#_Toc174933534)

[II.3. Pokok-Pokok Penelitian 41](#_Toc174933535)

[II.4. Alur Pikir 42](#_Toc174933536)

[BAB III 43](#_Toc174933537)

[METODE PENELITIAN 43](#_Toc174933538)

[III.1. Jenis Dan Tipe Penelitian 43](#_Toc174933539)

[III.2. Locus Penelitian 43](#_Toc174933540)

[III.3. Jenis Dan Sumber Data 44](#_Toc174933541)

[III.4. Informasi Penelitian 45](#_Toc174933542)

[III.5. Teknik Pengumpulan Data 46](#_Toc174933543)

[III.6. Teknik Analisis Data 48](#_Toc174933544)

[III.7. Sistematika Penulisan 50](#_Toc174933545)

[BAB IV 53](#_Toc174933546)

[DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN 53](#_Toc174933547)

[IV.1. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kota Tegal 53](#_Toc174933548)

[IV.2. Sejarah Badan Narkotika Nasional Kota Tegal 55](#_Toc174933549)

[IV.3. Kondisi Geografis Badan Narkotika Nasional Kota Tegal 56](#_Toc174933550)

[IV.4. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Tegal 57](#_Toc174933551)

[IV.5. Visi Badan Narkotika Nasional Kota Tegal 58](#_Toc174933552)

[IV.6. Misi Badan Narkotika Nasional Kota Tegal 58](#_Toc174933553)

[BAB V 59](#_Toc174933554)

[HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59](#_Toc174933555)

[V.1. Hasil Penelitian 59](#_Toc174933556)

[V.1.1. Hasil Wawancara BNN Kota Tegal 59](#_Toc174933557)

[V.1.2. Hasil Wawancara Badan KESBANGPOL Kota Tegal 63](#_Toc174933558)

[V.1.3. Hasil Wawancara Polres Kota Tegal 69](#_Toc174933559)

[V.2. Pembahasan 74](#_Toc174933560)

[V.2.1. Koordinasi Penanggulangan Narkotika, Psikotropika Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) Di Kota Tegal 74](#_Toc174933561)

[V.2.2. Penerapan Koordinasi Intansi Pemerintah Berdasarkan Strategi Dan Program Khusus 74](#_Toc174933562)

[V.2.3. Koordinasi Antar Instansi Pemerintah Dalam Penanggulangan Narkotika, Psikotropika Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) Di Kota Tegal 83](#_Toc174933563)

[BAB VI 94](#_Toc174933564)

[PENUTUP 94](#_Toc174933565)

[VI.1. Kesimpulan 94](#_Toc174933566)

[VI.2. Saran 95](#_Toc174933567)

[DAFTAR PUSTAKA 97](#_Toc174933568)

[LAMPIRAN 99](#_Toc174933569)

[V.1.1. Indikator Implementasi Tugas Berdasarkan Fungsionalnya 155](#_Toc174933570)

# DAFTAR TABEL

[Tabel 1 – Jumlah Penyalahgunaan Napza di Kota Tegal 9](#_Toc164446102)

[Tabel 2 - Penelitian Terdahulu 16](#_Toc164446103)

# DAFTAR GAMBAR

[Gambar 2.1 Alur Pikir 42](file:///D:\Skripsi\Cloter%202024\Cloter%201\Hasil%20-%20Cloter%201\Danang%20Bangkit%20Saputro%20-%20(2119500021)\Danang%20Bangkit%20Saputro%20-%202119500021.docx#_Toc164446122)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian

Secara etimologis, narkoba atau narkotika didasarkan pada kata Inggris "*chug*" atau "*narcotics*", yang berarti "pereda tidur dan nyeri". Obat berasal dari istilah "narkotika", yang memiliki arti untuk menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan pingsan (pusing), Obat bius dan Obat bius. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Obat-Obatan Terlarang. (Mintawati, H., & Budiman, D, 2021:64).

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan International (*International Crime*), kejahatan yang terorganisir (*Organized Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba (Soedjono A, 2000:41).Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah internasional. Karena itu, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika harus disinergikan dengan kebijakan melalui kerjasama regional dan internasional. Indonesia sebagai salah satu negara yang turut menyetujui konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan meratifikasiselanjutnya dijadikan sebagai

peraturan untuk menanggulangi kejahatan narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UUNarkotika.Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabililasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi dilakukan setelah adanya ketetapan atau keputusan (vonis) hakim didasarkan pada keterangan dari pihak keluarga atau Rumah Sakit. Selama proses rehabilitasi dilakukan pengawasan dan pemantauan sampai pecandu benar-benar sembuh dan bebas dari kecanduan narkotika. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 menjadi pedoman teknis penanganan terbadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum, yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk mendapat rehabilitasi (www.bnn.go.id).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnyapengawasan.

Peredaran narkoba yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat sampai saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya. Julianan (2013:2) menyebutkan kehidupan di zaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika.

Di Indonesia angka korban penyalahgunaan narkotika dan waktu kewaktu menunjukan peningkatan pesat, bedasarkan data dari puslitdatin.bnn.go.id. BNN dan Polri mengungkap sebanyak 43.099 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada 2022. Dari jumlah tersebut, ditemukan sebanyak 50.721 tersangka laki-laki dan 4.731 tersangka lainnya adalah perempuan. Tahun 2023 sejak Januari hingga bulan Juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkoba dengan jumlah sebanyak 1.625 orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan lapisan masyarakat dan berbagai usia mulai dari anak-anak sampai yang sudah tua (puslitdatin.bnn.go.id).Dalam rangka agar pengedar, pengguna, penyalahguna narkotika ditindaklanjuti untuk bertanggung jawab atas perilakunya, maka pemerintah berwenang mengeluarkan Undang-Undang dan kebijakan, yang dimana mempunyai tujuan untuk memberantas pengguna narkotika sebagaimana mana yang dimaksud pada pasal 4 UUNarkotika yang berbunyi:

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika.

Target dan upaya pemerintah untuk merehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkotika belum berhasil, hal ini disebabkan karena jumlah pengguna narkoba yang direhabilitasi sulit tercapai karena anggaran dan fasilitas rehabilitasi kurang. Sebagaimana data Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSALITDATIN) BNN yang tercatat di “Indonesian Drugs Report2022” ada 43.320 pasien rehabilitasi pecandu narkoba di Indonesia sepanjang 2021.Berdasarkan fasilitatornya, mayoritas pasien direhabilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Umum Kementerian Hukum dan HAM. Jumlahnya mencapai 14.122 pasien atau 32,6% dari total pasien rehabilitasi nasional.Kemudian 10.016 pasien di lembaga rehabilitasi Kementerian Sosial, dan 9.779 pasien di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK).Ada pula 4.526 pasien yang direhabilitasi oleh komponen masyarakat, 2.396 pasien melalui intervensi berbasis masyarakat, dan 1.533 pasien di balai/loka rehabilitasi BNN.Sementara itu pasien yang direhabilitasi Kementerian Kesehatan hanya 947 orang atau 2,18% dari total pasien rehabilitasi nasional (databoks.katadata.co.id).

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan menurut Arief (2009:23) mengatakan bahwa, dapat ditempuh melalui 3 (tiga) elemen pokok yaitu: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*).

Melalui Peraturan Perundang-undangan pemerintah bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Selain menerapkan UUNarkotika, pemerintah juga memperkuat aturan hukum tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor2 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, yang didalamnya melibatkan peran serta dari gubernur/bupati/walikota.Badan Narkotika Nasional Kota Tegal mempunyai tugas yaitu menyusun, melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan PrekursorNarkotika, berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan narkotika dan prokersur narkotika.

Selain mempunyai tugas, Badan Narkotika Nasional Kota Tegal mempunyai fungsi yaitu, pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah kota, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantas dalam wilayah kota, pelaksanaan layanan hokum dan kerja sama dalam wilayah kota, pelaksaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dankomponen masyarakat dalam wilayah kota, pelayanan administrasi BNNK/Kota dan juga pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.Salah satu fungsi dari Badan Narkotika Nasional Kota Tegal adalah melaksanakan Tim Asesmen Terpadu untuk memberikan surat rekomendasi yang berupa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Didalam Peraturan Bersama yaitu pada Pasal 8 Ayat 3 Tim Asesmen Terpadu di bagi dua menjadi dua yaitu Tim Medis dan Tim Hukum. Tim Medis diantaranya Dokter, dan Psikolog. Tim Medis mempuyai tugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang. Sedangkan Tim Hukum beberapa diantaranya yaitu Penyidik Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham. Tim Hukum bertugas untuk melakukan analisis dalam kaitan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara. Hasil dari asesmen dari Tim Asesmen Terpadu ini merupakan surat rekomendasi yang berisi apakah penyalahguna berhak di rehabilitasi atau pidana penjara. Tim Asesmen Terpadu memberikan surat rekomendasi dengan melihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang dimana menjadi acuan untuk memberikan rekomendasi rehabilitasi kepada penyalahguna maupun pecandu narkotika yang tertangkap tangan oleh Penyidik.

Peraturan Bersamainstansi ini merupakan upaya dari Pemerintah dalam melaksanakan asesmen kepada penyalahguna narkotika. Dalam melaksanakan koordinasi penanganan penyalahgunaan narkotika oleh Tim Asesmen Terpadu di Kota Tegal melibatkan:

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tegal.
2. Penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Tegal.
3. Penyidik Polres Kota Tegal.
4. Kejaksaan Negeri Kota Tegal.

Keseluruhan tim diatas tergabung dalam koordinasi Penanganan Penyalahguna Narkotika oleh Tim Asesmen Terpadu. Seluruhnya bekerja sama saat Penyidik memerintahkan untuk melakukan asesmen kepada penyalahguna narkotika sampai persidangan (*case conference*) agar sesuai dengan tujuan yang disepakati yaitu rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika. Koordinasisebagai suatu usaha kerjasama yang melibatkan antara badan, instansi, dan unit dalam melaksanakan tugastugas sehingga dapat saling mengisi, saling melengkapi, dan saling membantu dalam menangani penyalahguna narkotika. Dalam pelaksanaan Penanganan Penyalahguna Narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu koordinasi yang dilakukan melibatkan Badan Narkotika Nasional sebagai Leading Sektor penanganan narkotika, Polisi, Kejaksaan, Dokter, semua pihak tergabung lalu dibentuk yaitu Tim Asesmen Terpadu.

Data BNN Kota Tegal 2023 menunjukan terdapat jumlah penyalahgunaan Napza yang mendapatkat pelayanan rehabilitasi di Klinik Pratama Bahari Sehat BNN Kota Tegalsebanyak :

Tabel1.1 – Jumlah Penyalahgunaan Napza di Kota Tegal

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun** | **Jumlah** |
| 1. | 2019 | 29 Orang |
| 2. | 2020 | 39 Orang |
| 3. | 2021 | 44 Orang |
| 4. | 2022 | 44 Orang |
| 5. | 2023 (September) | 43 Orang |

*Sumber : BNN Kota Tegal*

Dapat dilihat dari sumber data diatas pertahun 2019 hingga september 2023 mengalami peningkatan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan kategori Zat utama yang digunakan adalah :

1. Stimuln : 30% dari total 59 orang
2. Deperesan : 55% dari total 110 orang
3. Halusinogen : 15% dari total 39 orang

Sehingga dalam hal ini dirasa cukup menghawatirkan bila mana tidak segera diatasi karena terus mengalami peningkatan pertahunnya. Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota menjadi salah satu landasan bagi BNN Kota Tegal dan Instansi Pemerintah untuk bergerak melakukan koordinasi secara intensif guna mencegah adanya peningkatan yang keberlanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian “KOORDINASI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG (NARKOBA) DI KOTA TEGAL”.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana koordinasipenanggulangan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Kota Tegal?.
2. Bagaimana penerapan dan koordinasi antar instansi pemerintah dalam penanggulangannarkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Kota Tegal?.

## Tujuan Penelitian

1. Untukmengetahuikoordinasi penanggulangan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Kota Tegal.
2. Untuk mengetahuipenerapan dan koordinasi antar instansi pemerintah dalam penanggulangan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Kota Tegal.

## Manfaat Penelitian

### Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal maupun dari Universitas lainnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan meningkatkan citra positif program studi pendidikannya.

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai bahaya narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang sehingga untuk saling menjaga dan mengawasi lingkungan sekitar untuk mencegah serta menanggulangi atas adanya penyalahgunaan narkoba.

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mendorong pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerja dalam penanganan pada sektor narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang melalui koordinasi antar instansi untuk menyelesaikan dan memberantas penyalahgunaan Narkoba.

### Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian berikutnya dan menambah teori-teori baru untuk penelitian yang sejenis, serta juga dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pemerintahan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan mengenai koordinasi antar pemerintah dan instansi dalam penanggulangan narkoba.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## Kerangka Teori

### Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relavan dengan judul yang hendak di teliti yakni tentang“Koordinasi Antar Instansi Pemerintah Dalam Penanggulangan Narkoba, Psikotropika Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) Di Kota Tegal” sehingga pada dasarnya merujuk pada penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Disamping itu hasil penelitian sebelumnya baik berupa jurnal jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasis maupun proceding merupakan sumber gagasan yang penting untuk merumuskan masalah dalam penelitian tersebut. Beberapa penelitian terdahulu yang telah di lakukan peneliti antara lain sebagai berikut :

1. Sri Wulandari pada Jurnal Spektrum Hukum, Volume, Nomor 2, Oktober 2017, dengan judul “Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika” yang membahas mengenai penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia sangat memprihatinkan, bersifat urgen dan kompleks serta menunjukan tren yang semakin meningkat dengan resiko kecanduan yang semakin tinggi. Bahaya narkoba membawa

dampak luar biasa terhadap keselamatan jiwa, keamanan danketahanan berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilakukan upaya pengawasan secara ketat untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi sebagai alternatif penyelamatan para pengguna dari belenggu narkoba, karenanya diperlukan kepedulian dari setiap komponen untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) diberikan kewenangan pemerintah untuk melakukan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, sebab pengenaan pidana penjara 4 tahun (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) bukan solusi yang tepat dan efektif serta tidak memiliki efek jera karena penyalahguna narkotika adalah korban. Dengan demikian perbedaan dari pembahasan mengenai UUNarkotika akan peneliti bahas lebih lanjut mengenai keefektivitasannya oleh peneliti melalui peraturan pemerintah setempat (perda) untuk menanggulangi peredaran narkoba di Kota Tegal.

1. Diki Pahlevipada Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 8, Nomor 1, 2020 dengan judul “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda” yang menunjukkan bahwa BNN dalam hal ini sebagai Badan yang sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik untuk melaksanakan penanggulangan narkoba di wilayah yang rawan peredaran narkoba termasuk di kelurahan pelita Kota Samarinda. Penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh BNN dengan melihat rawannya peredaran narkoba pada zaman sekarang. Tidak hanya itu BNN juga melakukan koordinasi dengan Pihak Kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba, serta menangkap para bandar narkoba. Dengan demikian hal ini yang akan menjadi perbedaan pada penelitian ini mengenai adanya hambatan yang ditemui ketika melakukan penanggulangan narkoba oleh BNN di Kota Tegalseperti adanya keterbatasan personil dan kurangnya pengetahuan informasi kepada warga mengenai bahaya narkoba.
2. Rio Aryandi Erlangga, Darto, dan Hilman Abdul Halim pada Jurnal Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 2, Februari 2023, dengan judul “Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Timasesmen Terpadu Di Kota Cimahi” yang koordinasi penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu di Kota Cimahi ditemukan beberapa kendala yang mendasar seperti kurang nya anggaran serta belum efektifnya instnasi pelaksana, adanya mutasi dinas pada instnasi pelaksana yang ditunjuk menjadi Tim Asesmen Terpadu. Terdapat perbedaan dalam peneliti dalam penelitian peneliti yang menggunakan teori faktor-faktor keberhasilan koordinasi yang akan mendeskripsikan koordinasi penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu di Kota Tegal yang lebih efektif. Maka dari itu,peneliti memberikan saran terkait koordinasi penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu perlu melakukan upaya terhadap anggaran pelaksanaan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu, koordinasi yang dilakukan lebih baik langsung kepada anggota Tim Asesmen Terpadu.

Table 2.1 -Penelitian Terdahulu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Penulis** | **Judul** | **Kesimpulan** |
| 1. | Sri Wulandari | Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika | kewenangan pemerintah untuk melakukan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, sebab pengenaan pidana penjara 4 tahun (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) bukan solusi yang tepat dan efektif serta tidak memiliki efek jera karena penyalahguna narkotika adalah korban |
| 2. | Diki Pahlevi | Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda | hambatan yang ditemui ketika melakukan penanggulangan narkoba oleh BNN yaitu keterbatasan personil dan warga yang masih menyembunyikan paraBandar dan tidak melaporkan ke pihak berwajib dan kurangnya pendidikan dari warga sekitar mengenai bahaya narkoba |
| 3. | Rio Aryandi Erlangga,Darto, dan Hilman Abdul Halim | Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Timasesmen Terpadu Di Kota Cimahi | koordinasi penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu perlu melakukan upaya terhadap anggaran pelaksanaan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu, koordinasi yang dilakukan lebih baik langsung kepada anggota Tim Asesmen Terpadu |

### Narkoba

Secara Harfiah Narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Edi Warsidi (2006:6) dalam bukunya yang berjudul, “Mengenal Bahaya Narkoba”, menjelaskan bahwa narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya. Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Farmakologi medis, yaitu “Narkotik adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi. Menurut Soerdjono Dirjosisworo, Narkoba adalah bahwa zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifatsifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Menurut Kurniawan (2008), Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan lain sebagainya.

Menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-pergangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydo morhine.Sesuai dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu :

1. Narkotika Menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986) bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh.” Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:
2. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
3. Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.
4. Narkotika golongan III, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: kodein dan turunannya.
5. Psikotropika Pengertian Psikotopika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika digolongkan lagi menjadi 4 kelompok adalah :
6. Psikotropika golongan I, adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contoh: MDMA, LSD, STP, dan ekstasi.
7. Psikotropika golongan II, adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : amfetamin, metamfetamin, dan metakualon.
8. Psikotropika golongan III,adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: lumibal, buprenorsina, dan fleenitrazepam.
9. Psikotropika golongan IV, adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : nitrazepam (BK, mogadon, dumolid) dan diazepam.
10. Zat adiktif lainnya Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah :
    1. Rokok
    2. Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
    3. Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan. (Alifia, 2008).

Narkoba mengacu pada zat atau Obat yang berasal dari tumbuhan dan bukan dari tumbuhan. Baik sintetis maupun semi-sintetik, Obat tersebut dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hilangnya aroma, dan menyebabkan kecanduan, mempakan bahan kimia yang diharapkan dapat menyembuhkan kesehatan. Saat zat ini masuk ke dalam organ, fungsinya akan mengalami satu atau lebih perubahan. Kemudian, situasi ini akan berlanjut dengan kecanduan fisik dan psikologis. Jika tubuh tidak mengizinkan zat tersebut untuk digunakan, maka penyakit fisik dan mental.

### Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat berdampak pada kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Unhik melindungi masyarakat dan lebih mengefefai dan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika pemerintah telah melafalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dengan penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN). Landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peratuan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, sebagai pedoman teknis penanganan terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika.

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika dapat bersifat bahaya pribadi dan bahaya sosial yaitu bahaya terhadap masyarakat dan lingkungannya. Bahaya pribadi dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala - gejala sebagai berikut:

1. *Euphoria*, yaitu suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai denngan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak).
2. *Dellirium*, yaitu suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami penurunan kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan gerakan pada angauta tubuh si pemakai ( biasanya pemakaian dosis lebih banyak, dari angka 1).
3. *Halusinasi*, yaitu suatu keadaan dimana si pemakai narkoba mengalami ”khayalan”, misalnya melihat, mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
4. *Weakness*, yaitu kelemahan yang dialami fisik atau psikis / kedua – duanya.
5. *Drowsiness*, yaitu kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan dan mengantuk.
6. *Coma*, yaitu keadaan si pemakai sampai pada puncak kemerosotan yang bisa sampai pada kematian (Anonim, 2009:74).

Memahami akan bahaya yang begitu kompleks maka penyebab pecandu dan penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Faktor Internal
2. Perasaan egois
3. Kehendak ingin bebas
4. Kegoncangan jiwa
5. Rasa keingintauan.
6. Faktor Ekstemal
7. keadaan ekonomi
8. pergaulan / lingkungan
9. kemudahan
10. kurangnya pengawasan
11. ketidaksenangan dengan keadaan sosial. (https://kampungkb.bkkbn.go.id/)

Narkoba yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk kedalam lambung kemudian ke pembuluh darah. Sedangkan jika dihisap atau dihirup, maka narkoba akan masuk kedalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikan otak (sistem saraf pusat). Semua jenis narkoba akan merubah perasaan dan cara pikir orang yang mengkonsumsinya seperti perubahan suasana hati menjadi tenang, rileks, gembira dan rasa bebas. Perubahan pada pikiran seperti stress menjadi hilang dan meningkatnya daya khayal. Perubahan perilaku seperti meningkatnya keakraban dengan orang lain tetapi lepas kendali. Perasaan-perasaan seperti inilah yang pada mulanya dicari oleh pengguna narkoba. Narkoba menghasilkan perasaan “*high*” dengan mengubah susunan biokimiawi molekul sel otak pada sistem Limbus (bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan, dimana dalam Limbus ini terdapat Hipotalamus yaitu pusat kenikmatan pada otak) yang diseut *neuro-trasnmitter*. Pengaruh narkoba terhadap perubahan suasana hati dan perilaku memang begitu drastis sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bebas dari rasa kesepian

Dalam masyarakat modern yang cenderung individualis, maka narkoba mampu menjadi “obat yang manjur”, karena pada tahap jangka pendek narkoba menyebabkan keakraban dengan sesama serta hilangnya rasa kesepian. Namun dalam jangka panjang, narkoba justru menimbulkan efek sebaliknya yaitu rasa terisolasi dan kesepian.

1. Bebas dari perasaan negatif lain

Kecanduan menyebabkan seseorang sibuk dengan kecanduannya, sehingga ia merasa tidak perlu memperhatikan perasaan dan kekosongan jiwanya. Narkoba akan melanjutkannya dari perasaan kekurangan, kehilangan bahkan konflik.

1. Kenikmatan semu

Dalam masyarakat berorientasi pada uang dan kekuasaan sebagai tolak ukur keberhasilan, narkoba menggantikan reaksi dengan memberikan sensasi kebebasan dari perasaan tertekan dan ikatan waktu.

1. Pengendalian semua

Narkoba menyebabkan seseorang merasa mampu mengatasi situasi dan memiliki kekuasaan

1. Krisis yang menetap

Narkoba memberikan bergairah dan sekaligus ketegangan untuk menggantikan perasaan yang sebenarnya.

1. Meningkatan penampilan

Narkoba mampu menyembunyikan ketakutan atau kecemasan serta membius seseorang dari rasa sakit dan tersinggung karena mendapatkan penilaian dari orang lain.

1. Bebas dari perasaan waktu Pada saat mengkonsumsi narkoba, seseorang merasa waktu seakan-akan terhenti sehingga masa lalu tidak lagi menghantui dirinya demikian juga dengan masa depan karena yang ada baginya hanya kenikmatan pada saat itu. (https://bnn.go.id/)

### Koordinasi

#### Teori Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu. Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2003:290).

Koordinasi terdapat pengertian yang berbeda-beda, Hasibuan (20011:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut Ismail Solihin (2009:91)koordinasi adalah upaya dari sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi. Penggabungan yang terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan upaya perseorangan, sedangkan menurut Manullang (2008:72) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

#### Indikator Koordinasi

Menurut Handayaningrat (1989:119-121)menjelaskan fungsi koordinasi adalah sebagai berikut :

* 1. Sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan. Dengan kata lain koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan.
  2. Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama di antara komponen-komponen tersebut.
  3. Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan secara serasi dan simultan/singkronisasi dari seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal itu sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan singkronisasi.
  4. Sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu dan ditentukan oleh kualitas usaha koordinasi yang dijalankan. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu dilakukan secara terus menerus karena tidak hanya masalah teknis semata tetapi tergantung dari sikap, tindakan, dan langkah dari pemegang fungsi organik dari pimpinan.
  5. Untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja yang membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi. Hubungan kerja ini perlu dipelihara agar terhindar dari berbagai rintangan yang akan membawa organisasi ke situasi yang tidak berfungsi sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien.
  6. Sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana. Dalam organisasi yang besar dan kompleks, pertumbuhan organisasi akan menyembabkan penambahan beban kerja, penambahan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan dan penambahan jabatan yang perlu di koordinasikan.
  7. Untuk penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas. Karena timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Penanggulangan Koordinasi

Penanggulangan koordinasi adalah adalah suatu usaha, kegiatan-kegiatan, kerjasama dan kesepakatan bersama secara teratur serasi, selaras, seimbang dan serempak dalam mencapai suatu tujuan. Untuk menanggulangi adanya peredaran dan penyalahguaan narkotika di Kota Tegal terdapat model penganggulangan koordinasi secara ketat yang dilakukan oleh BNN dan Kepolisian di Kota Tegal dengan model koordinasi dan fungsionalnya adalah :

1. Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Pengertian kepolisian juga terdapat dalam Undang-Undang di Indonesia. Undang-undang yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 1 ayat (1). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Polri dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, melakukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang,yang biasa disebut faktor “*korelatif kriminologen*” dari kejahatan narkotika, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba. Yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan Narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhanadan kegiatan positif,terutama bagi remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstraktif, dan kreatif. Sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif, yang dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.

1. Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar Police Hazard tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

1. Represif

Upaya Represif atau penindakan dilakukan dengan cara melakukan penangkapanpenangkapan terhadap para pengguna dan pengedar narkoba. Penangkapan tidak hanya dilakukan terhadap warga negara Indonesia saja, tetapi penangkapan juga dilakukan terhadap warga negara asing yang terlibat.

1. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Keberadaan badan narkotika nasional sesuai dengan Keppres RI No.17/2002 tanggal 22 maret 2002, dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, kiranya harus lebih aktif mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psykotropika, precursor dan aditif lainnya. Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) disebut dalam Pasal 70 Undang-Undang 39 tahun 2009 dan Pasal 2 Perpres Nomor 23 tahun 2010, sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pecegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multirateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Suatu Tindakan koordinasi Badan Narkotika Kota Tegal dengan instansi atau dinas terkait seperti diatas merupakan salah satu tolak ukur dalam koordinasi antara instansi tersebut yang penulis teliti, dimana kesadaran setiap anggota instansi baik dari BNN Kota Tegal maupun dari instansi tersebut untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri dan agar usaha-usaha setiap kegiatan dalam pembangunan sejalan dengan tugas mereka masing-masing sehingga bisa mendapatkan keserasian dalam mencapai hasil dalam tugas mengurangi atau menanggulangi kasus Narkotika dengan berlandaskan :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dimana undangundang tersebut mengatur ketentuan-ketentuan yang mendukung Badan Narkotika Nasional dalam tugasnya mencegah dan memberantas peredaran narkoba.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan kebijakan dan strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan penyelahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba Tahun 2011-2015.
3. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2022 dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahan dan Peredaran Gelap Narkotka dan Prekusor Narkotika.
4. Dukungan dan kerjasama pemerintah seperti POLRI, Dinas Kesehatan, Rehabilitasi dalam pelaksanaan P4GN.

Salah satu bentuk koordinasi BNN dengan antar instansi lain adalah dengan cara melakukan pembinaan dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, instansi-instansi pemerintahan, beberapa universitas yang ada di Kota Tegal dan juga mengadakan forum terbuka untuk even atau acara tertentu. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi antar kedua instansi tersebut dalam penanggulangan kasus Narkotika di Kota Tegal. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin dari tiap-tiap organsasi atau instansi harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu maupun kelompok sehingga adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Badan Narkotika Nasional dan pihak kepolisian Kota Tegal telah berusaha memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat baik dari sekolah-sekolah mencakup SMP dan SMA sampai perguruan tinggi, Instansi Pemerintahan serta forum terbuka di Kota Tegal. Dengan adanya pembinaan atau sosialisasi yang dilakukan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan seputar narkotika dan bahaya narkotika yang sedang marak berkembang pesat dimasyarakat khususnya kalangan remaja. Inti dari pembinaan ini ialah dapat memberikan motivasi serta kerjasama untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari narkotika

## Definisi Konseptual

Singarimbun (1990) mengatakan bahwa konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Dalam kenyataannya konsep mempunyai tingkat generalisasi tertentu. Semakin dekat dengan realita semakin mudah konsep itu diukur dan diartikan. Konsep dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu konsep abstrak dan konsep kongkrit. Konsep kongkrit yakni yang dapat diukur dengan alat ukur fisik, artinya terukur dengan kasat mata. Penulis memberikan definisi konsep sebagai berikut :

1. Penanggulangan Narkoba, adalah tindakan untuk mengatasi, menghapus, dan menyelesaikan tentang peredaran barang-barang yang terbuat dari suatu zat yang tidak seharusnya untuk dikonsumsi oleh manusia tanpa adanya pengawasan dan anjuran dokter karena jika disalahgunakan menyebabkan efek berbahya seperti kecanduan, kejang, gelisah, pusing, bahkan dapat menyebabkan kematian.
2. Koordinasi antar instansi, adalah suatu hubungan Kerjasama yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu target yang akan diselesaikan, sehingga setiap instansi dapat menjalin komunikasi dengan baik, kerjasama yang energik, hingga penyelesaian tugas secara tepat.

## Pokok-Pokok Penelitian

Pokok penelitan merupakan definisi secara terstruktur atas sumber-sumber data pada penelitian yang dideskripsikan dan diuraikan diatas. Fungsi dari adanya pokok-pokok penelitian adalah memberikan suatu gambaran umum mengenai inti dari poin-poin pembahasan berdasarkan indikator alur pikir dari penelitian yang terdiri dari :

1. Komunikasi
2. Ada tidaknya informasi
3. Ada tidaknya alur informasi
4. Ada tidaknya teknologi informasi
5. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
6. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
7. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
8. Kompetensi Partisipan
9. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
10. Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat
11. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi
12. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
13. Ada tidaknya pelaksana kegiatan
14. Ada tidaknya sanksi bagi pelnggar kesepakatan
15. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi
16. Kontinuitas Perencanaan
17. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan
18. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan.

## Alur Pikir

Alur pikir pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif yang disusun secara sistematis dan terstruktur mengenai topik dari penelitian ini mengenai Koordinasi Antar Instansi Pemerintah Dalam Penanggulangan Narkotika, Psikotropika Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) Di Kota Tegal yang digambarkan sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) di Kota Tegal

Pembentukan Tim Pembagian Tugas Pokok dan Fungsi

Penerapan Hasil dari Kerjasama antar Instansi atas penanggulangan Narkotika di Kota Tegal

Koordinasi Antar Instansi

1. Kerjasama antar instansi yang terlibat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
2. Pembentukan tim penanggulangan narkotika
3. Persiapan dan identifikasi dalam target yang harus diselesaikan
4. Implementasi tugas berdasarkan fungsionalnya

Model Koordinasi Yang Digunakan

1. Melakukan kerja sama bilateral dan multirateral antar instansi secaraPre-emptif, Preventif, danRepresif
2. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
3. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Gambar 2.1 Alur Pikir

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan penelusuran pada informasi melalui beberapa sumber seperti jurnal, buku, internet, dan lainnya yang mendukung dan sesuai dengan penelitian penulis mengenai penanggulan narkoba. Penelitian kualitatif menjadi pilihan penulis karena sesuai dengan alur dan jenis pada penelitian ini yang digunakan untuk dapat memahami mengenai regulasi dari instansi-instansi pemerintahan untuk menanggulangi bahaya narkoba di Kota Tegal dengan subjek penelitian seperti penanganan, peraturan, komunikasi antar instansi, tindakan, dan lainnya untuk menggambarkan secara langsung fakta-fakta yang telah ada dan sudah diterapkan oleh BNN Kota Tegal, Badan KESBANGPOL Kota Tegal, Pemerintah Kota Tegal, serta pihak-pihak lainnya yang ikut berkontribusi untuk menanggulangi bahaya narkoba di Kota Tegal.

## Locus Penelitian

Lokus penelitian ini adalah tempat bagi penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan sumber data dan informasi mengenai model koordinasi antar instansi pemerintah di Kota Tegal, dengan demikian locus penelitian ini dilakukan di beberapa tempat seperti :

1. BNN Kota Tegal, yang beralamatkan di Jl. Sembilang No. 01, Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52131.
2. Polres Kota Tegal, yang beralamatkan di Jl. Pemuda No. 02, Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, 52313.
3. Badan KESBANGPOL Kota Tegal, yang beralamatkan di Jl. Ki Gede Sebayu No. 06, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, 52131.

## Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau telah disediakan oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen yang dijadikan referensi untuk membahas konsep penanggulanan narkoba berdasarkan penerapan di Kota Tegal yang terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

Bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2022 yang relevan dengan penelitian ini sehingga dapat membantu peneliti untuk menjadi sumber data yang dapat dikelola dalam bentuk deskriptif.

1. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berfungsi untuk membahas dan menjelaskan terhadap bahan data primer, seperti informasi data pengguna narkoba di Kota Tegal yang diterbitkan oleh BNN melalui pusatlitdatin, literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini yang dapat diperoleh melalui kepustakaan dan referensi dari media informasi di internet yang relevan.

## Informasi Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan pihak yang bersedia untuk memberikan informasi mengenai suatu keabsahan dari sumber yang diterima tentang data-data dalam penelitian ini yang dapat peneliti secara lebih dalam sehingga peneliti dapat menggali suatu informasi yang dapat digunakan pada penelitian ini dengan berlandaskan informasi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama** | **Instansi** | **Jabatan** |
| 1. | Ernawati, S.H., M.H. | Badan Narkotika Nasional Kota Tegal | Penyuluh Narkoba Ahli Muda |
| 2. | Bripka Doni Kuncoro | POLRES Kota Tegal | Satreskim Narkoba |
| 3. | Brigadir Rahmawati | POLRES Kota Tegal | Satreskim Narkoba |
| 4. | Teti Dian Lestari | POLRES Kota Tegal | Satreskim Narkoba |
| 5. | Muhammad Farid D. | Badan KESBANGPOL Kota Tegal |  |

Penulis mendapatkan sumber informasi melalui wawancara dengan narasumber dari masing-masing pihak perwakilan dari setiap seksi dan sub bagian umum di BNN Kota Tegalberupa dokumen serta data pendukung lainnya, wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan dikumpulkan menjadi satu kesatuan. Teknik pengumpulan data merupakan proses terstruktur dalam sebuah penelitian dimulai dari adanya jenis dan tipe penelitian hingga sumber data yang nantinya dikumpulkan untuk menjadi sebuah instrument suatu bahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data, di antaranya adalah:

1. Wawancara

Teknik wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dan wawancara berbingkaikepada narasumber diBNN Kota Tegal dan pihak-pihak yang dapat menunjang kebutuhan data peneliti untuk dapat digunakan. Wawancara terstruktur ialah wawancara yang dilaksanakan dengan menggunakan bahan pertanyaan atau pedoman yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Pedoman pertanyaan dapat mengarahkan peneliti agar apa yang ditanyakan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga batasan topik yang akan ditanyakan menjadi jelas.

1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah teknik mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan sejumlah dokumen atau informasi yang didokumentasikan. Dokumen ini dapat berbentuk terekam maupun tertulis. Dokumen terekam dapat berbentuk video, film, foto, kaset rekaman, dan sebagainya. Sedangkan, dokumen tertulis dapat berupa arsip, nenorial, kumpulan surat pribadi, catatan harian, autobiografi, kliping, dan sebagainya.Pengumpulan data dokumentasi dalam penelitian ini yang berhasil peneliti dapatkan berupa dokumen, rekaman suara, foto, serta autobiografi dari BNN Kota Tegal sebagai pendukung atas keabsahan data atas penelitian ini secara langsung yang kemudian dimuat dalam penelitian.

1. Observasi

Observasi ialah melihat dan mengamati dengan penuh perhatian. Dalam konteks penelitian, observasi dimaknai sebagai cara-cara melakukan pencatatan secara sistematis terkait perilaku dengan cara melihat dan mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung (Basrowi & Suwardi, 2008:93). Metode observasi merupakan salah satu varian pilihan metode pengumpulan data yang memiliki karakter kuat secara metodologis karena peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi dan berinteraksi secara langsung kepada pihak-pihak terkait sehingga dapat mendapatkan sebuah data yang actual dan benar adanya atas informasi yang diperloleh oleh peneliti.

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode analisi data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode analisi data kualitatif merupakan proses menyusun data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga tema bisa ditemukan dan disajikan dalam bentuk narasi dan juga deskriptif.Analisis Data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis dat yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas (Salim H.S, 2017:19).

Data yang sudah diperoleh dengan berbagai teknik pengumpulan data kemudian diolah dan dianalisis agar dapat memberikan informasi yang akurat mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Miles dan Huberman (1994) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif proses analisis data dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemusatan perhatian sehingga data mengalami penyederhanaan. Proses reduksi data dilakukan dengan memilih data-data yang dihasilkan dari observasi dan wawancara sehingga dapat dilakukan pengabstrakan dan transformasi data “mentah” dari catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data dilaksanakan secara terus menerus selama data yang penelitian kualitatif berlangsung. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya ialah merangkum, menelusuri tema, mengkode, mengelompokkan, membuat partisi. Dan menulis memo. Proses mentransformasikan ini berlangsung terus setelah penelitian lapangan hingga laporan akhir lengkap tersusun.

1. Penyajian Data

Penyajian-penyajian ini dapat dilihat agar kita memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh, apakah akan menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uraian singkat yang bersifat naratif dan deskriptif.

1. Penarikan Kesimpulan

Analisis ketiga yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Berdarkan data yang sudah dipilih, diseleksi, dan ditransformasikan sehingga dapat digambarkan dengan rinci fenomena yang sedang terjadi dan dapat dipahami, maka langkah selanjutnya ialah mengambil kesimpulan atau mengambil inti dari data yang telah terkumpul sehingga dapat diuraikan dengan jelas.

## Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan suatu penjelasan mengenai pembahasan penelitian yang memiliki hubungan dengan topik penelitian serta bertujuan guna mempermudah dalam pemahaman serta mendapatkan hasil yang runtun dan sistematis dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis membagi sistematika pembahasan ini dari bagian awal yang terdiri dari uraian sub babnya yaitu:

1. BAB I - PENDAHULUAN

Pada awal bab ini peneliti menyajikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian.

1. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti menguraikan kerangka teoritis yang mendasari penulisan mengenai model koordinasi dan penanggulan.

1. BAB III – METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang jenis dan tipe penelitian berdasarkan sumber data melalui metode pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

1. BAB IV – DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang daerah penelitian berdasarkan kondisi geografis dan data-data penyalahgunaan narkoba yang telah ditemukan dan tanggulangi.

1. BAB V - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan berdasarkan permasalahan yang ada yaitu upaya penanggulangan penanggulangan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Kota Tegal serta penerapan dan model koordinasi antar instansi pemerintah dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Kota Tegal.

1. BAB IV PENUTUP

pada bab ini peneliti akan memberikan simpulan berdasarkan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

# BAB IV

# DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

## Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kota Tegal

BNNK/Kota terdiri atas:

1. Kepala BNNK/Kota mempunyai tugas :
2. memimpin BNNK/Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota; dan
3. mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota.
4. Subbagian Umum mempunyai tugas :

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah BNNK/Kota.

1. Seksi Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas:

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunanP4GN, kebijakan teknis P4GN, diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota.

1. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, asesmen penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkotika baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten/Kota.

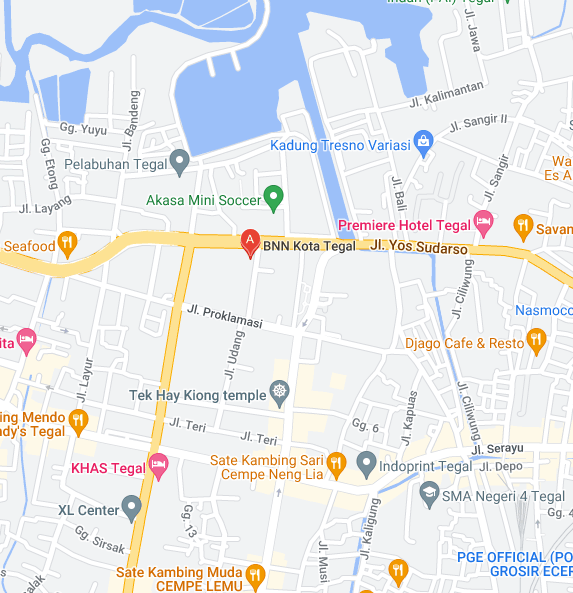
1. Seksi Pemberantasan mempunyai tugas :

Seksi Pemberantasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota.

## Sejarah Badan Narkotika Nasional Kota Tegal

Dalam rangka menjalankan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Perdaran Gelap Narkotika (P4GN), dan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, BNN Kota Tegal secara resmi telah beroperasi sejak 01 September 2015. Sejalan dengan subtansi Peraturan Kepala BNN RI No.05 tahun 2015 yang merupakan perubahan atas peraturan Kepala BNN No.10 tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, terbentuknya BNN Kota Tegal merupakan wujud dari sinergitas/ hubungan yang baik antara BNN RI dengan Pemerintah Daerah Kota Tegal. Sejak awal beroperasinya pada akhir tahun 2015, BNN Kota Tegal berkantor di salah satu ruangan Gedung eks Samsat Kota Tegal Jl.Ki Gede Sebayu di Lingkungan Perkantoran Pemkot Tegal sampai dengan Februari 2016 dengan dikepalai oleh Pejabat Pemkot Tegal Jaka Eka Syaifi,SE hingga Maret 2017, dengan dibantu lima pegawai lain yang juga berasal dari lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Pada masa jabatan Kepala BNN Kota Tegal dipimpin oleh AKBP Drs.Windarto (Maret 2017 – Januari 2019) beberapa pegawai organik BNN Pusat dan BNN tingkat daerah ditempatkan di BNN Kota Tegal untuk mengganti Pegawai Pemkot Tegal yang ditarik kembali dan pensiun pada pertengahan 2016, dan Pegawai Pemkot Tegal yang diperbantukan (DPK) di BNN Kota Tegal hanya tersisa satu orang yaitu Ibu Ir.Amalia Hidayati, MM sebagai Kasi Rehabilitasi hingga sekarang.

## Kondisi Geografis Badan Narkotika Nasional Kota Tegal

Jl. Sembilang No.01, Tegalsari, Kec. Tegal Bar., Kota Tegal, Jawa Tengah 52131

Gambar 4.1 – Kondisi Geografis

## Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Tegal

Tabel4.1 – Struktur Organisasi

|  |
| --- |
| **Kepala BNN Kota Tegal** |
| Sudirman, S.Ag., M.Si |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SubBagian Umum** | | |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** |
| 1. | Mukti Ali, S.IP.,M.Si. | Kasubag Umum BNN Kota Tegal |
| 2. | Prasasti Yuni Hutami, A.Md. | Bendahara |
| 3. | Haris Hermowo, A.Md. | Verifikator Keuangan |
| 4. | Siti Fasikha, S.H. | Pengolah Data Subbag Umum |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Seksi P2M** | | |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** |
| 1. | Satriana, P.Si. | Analis Penyuluhan dan Informasi |
| 2. | Solikhah Ernawati, S.H.,M.H. | Analis Pemberdayaan Masyarakat |
| 3. | Rus Indah Kumalasari, A.Md. Farm | Penyuluh Non PNS |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Seksi Rehabilitasi** | | |
| **No.** | **Nama** | **Jabatan** |
| 1 | Riza Fauzal, SKM. | Konselor Adiksi |
| 2 | Chandra Ardiansyah, A.Md. Kep. | Perawat Klinik Pratama Bahari Sehat |
| 3 | Syauqi Fahmi, A.Md. | Petugas Rehabilitasi Komponen Masyarakat |
| 4. | Banu Rifaldi, A.Md. | Petugas Pasca Rehabilitasi |

## Visi Badan Narkotika Nasional Kota Tegal

Menjadi LembagaNon Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh koponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia

## Misi Badan Narkotika Nasional Kota Tegal

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugasdan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkankepada Presiden.